

Digitalisasi Layanan Publik Desa Hansisi melalui Implementasi Website Terpadu

¹⁾Ign. Pricher A. N. Samane, ²⁾Alfry Aristo Jansen Sinlae*, ³⁾Emanuel Jando, ⁴⁾Yakobus Rega Badhe, ⁵⁾Maria Mechtildis Elu, ⁶⁾Floribertha Lake

^{1),2),3),4),5)}Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

⁶⁾Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

Email Corresponding: alfry.aj@unwira.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Website Desa
Pelayanan Publik
e-Government
Pengabdian Masyarakat
Digitalisasi Desa

Desa Hansisi, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, menghadapi permasalahan keterbatasan akses informasi publik, rendahnya efisiensi pelayanan administrasi, serta belum optimalnya promosi potensi desa akibat ketiadaan media digital resmi. Informasi desa masih disampaikan secara konvensional melalui papan pengumuman dan pertemuan tatap muka, sehingga jangkauannya terbatas dan tidak terdokumentasi secara sistematis. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah implementasi website desa terpadu sebagai media informasi publik, pelayanan administrasi berbasis digital, serta sarana promosi potensi lokal desa. Metode yang digunakan berupa pelatihan dan pendampingan dengan pendekatan partisipatif serta model pengembangan sistem waterfall yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Kegiatan dilaksanakan melalui survei awal, pengembangan website berbasis WordPress, pelatihan pengelolaan konten kepada perangkat desa, serta pendampingan penggunaan sistem. Evaluasi dilakukan menggunakan kuesioner pre-test dan post-test serta observasi pemanfaatan website. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada kapasitas mitra. Literasi digital perangkat desa meningkat dari 30% menjadi 82%, akses informasi masyarakat meningkat dari 40% menjadi 85%, dan efisiensi pelayanan administrasi meningkat dari 35% menjadi 80%. Website desa berfungsi sebagai pusat informasi terpadu, media transparansi pemerintahan, serta sarana promosi potensi UMKM dan pariwisata lokal. Dengan demikian, implementasi website desa terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa berbasis digital.

ABSTRACT

Keywords:

Village Website
Public Service
e-Government
Community Service
Village Digitalization

Hansisi Village, Semau District, Kupang Regency, faces limited access to public information, low efficiency of administrative services, and an underutilized promotion of village potential due to the absence of official digital media. Village information is still delivered conventionally through bulletin boards and face-to-face meetings, limiting its reach and making it difficult to systematically document. The solutions offered in this activity include implementing an integrated village website as a public information medium, providing digital administrative services, and promoting the village's local potential. The methods used are training and mentoring, with a participatory approach and a waterfall system development model, including needs analysis, design, implementation, testing, and evaluation. The activity was carried out through initial surveys, WordPress-based website development, content management training for village officials, and assistance with system use. Evaluation was carried out using pre-test and post-test questionnaires as well as observation of website utilization. The activity results showed a significant increase in partner capacity. Digital literacy of village apparatus increased from 30% to 82%, access to community information increased from 40% to 85%, and administrative service efficiency increased from 35% to 80%. The village website serves as an integrated information center, a medium for government transparency, and a means to promote the potential of MSMEs and local tourism. Thus, the implementation of village websites has proven to be effective in improving the quality of public services and digital-based village governance.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan fundamental dalam tata kelola pemerintahan, termasuk pada level pemerintahan desa. Implementasi *electronic government (e-government)* menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat (Anto et al., 2025; Nurfadillah et al., 2025). Melalui pemanfaatan teknologi digital, pemerintah dapat menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat (Mappisabbi et al., 2024; Vereinte Nationen, 2020). Dalam konteks desa, transformasi digital memiliki urgensi tersendiri mengingat desa merupakan unit pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta berperan strategis dalam pembangunan lokal (Admin, 2025; Lailiyah, 2022; Panjaitan et al., 2025).

Sejumlah studi terbaru menunjukkan bahwa penerapan website desa sebagai bagian dari *e-government* memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan publik. Djabbari et al. (2024) dan Abbas & Sutrisno (2022) melaporkan bahwa pemanfaatan website desa mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan, mempercepat proses administrasi, serta mendorong keterbukaan informasi publik. Adnan et al. (2024) dan Ariyanto et al. (2021) juga menemukan bahwa sistem informasi publik berbasis website desa efektif dalam menyederhanakan prosedur pelayanan administrasi sekaligus meningkatkan transparansi pemerintahan desa. Temuan serupa dilaporkan oleh Wanda (2025) dan Maharani & Ulfa (2022) yang menyatakan bahwa website desa berperan penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan pengawasan pembangunan desa.

Dalam skala global, kajian yang dilakukan oleh Mao et al. (2024) menunjukkan bahwa pengembangan *digital villages* berkontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah pedesaan, termasuk akses informasi, layanan administrasi, serta promosi potensi lokal. Studi lain yang dipublikasikan oleh Liao et al. (2025) menegaskan bahwa transformasi digital di wilayah rural mampu mendorong pemerintahan yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa digitalisasi pemerintahan desa melalui website merupakan praktik yang relevan dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik (Isabella et al., 2025).

Meskipun demikian, sebagian besar studi terdahulu masih berfokus pada implementasi *e-government* di wilayah perkotaan atau desa yang memiliki infrastruktur digital relatif baik. Kajian empiris mengenai implementasi website desa di wilayah kepulauan dan pesisir, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan kebaruan ilmiah berupa analisis implementasi website desa sebagai media informasi dan pelayanan publik digital pada konteks desa pesisir, yaitu Desa Hansisi, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Kebaruan lainnya terletak pada pengintegrasian fungsi pelayanan administrasi, publikasi informasi desa, serta promosi potensi lokal dalam satu platform digital yang dikelola langsung oleh perangkat desa (Artamevia et al., 2026; Nani et al., 2020; Sangaji & Irianto, 2025).

Hasil observasi awal dan wawancara dengan perangkat Desa Hansisi, diketahui bahwa desa belum memiliki website resmi sebagai sumber informasi terpadu. Penyebaran informasi pemerintahan masih dilakukan secara konvensional melalui papan pengumuman dan pertemuan tatap muka, sehingga jangkauan informasi menjadi terbatas. Selain itu, potensi desa berupa sektor perikanan, pertanian, pariwisata, dan UMKM belum terpromosikan secara optimal melalui media digital (Nani et al., 2023; Sinlae et al., 2023). Permasalahan lain yang ditemukan adalah keterbatasan literasi digital sebagian perangkat desa yang berdampak pada rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik. Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya akses informasi masyarakat, keterbatasan transparansi, serta minimnya partisipasi warga dalam proses pembangunan desa (Al-Ra'zie et al., 2025).

Kesenjangan antara kondisi ideal desa digital dengan kondisi aktual Desa Hansisi menunjukkan perlunya intervensi berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, kegiatan ini difokuskan pada implementasi website desa sebagai media informasi publik, sarana pelayanan administrasi digital, serta wahana promosi potensi lokal. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi pemerintahan desa, efisiensi pelayanan publik, serta kapasitas literasi digital perangkat desa dan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah merancang dan mengimplementasikan website Desa Hansisi sebagai media informasi dan pelayanan publik digital. Secara khusus, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemanfaatan website desa terhadap efektivitas pelayanan administrasi, keterbukaan informasi publik, serta partisipasi masyarakat. Selain itu, artikel ini juga menyajikan rekomendasi strategis bagi pemerintah desa dalam

pengelolaan website secara berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.

II. MASALAH

Sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian, Desa Hansisi belum memiliki website resmi sebagai pusat informasi terpadu. Penyampaian informasi pemerintahan desa masih dilakukan secara manual melalui papan pengumuman dan pertemuan tatap muka. Pola ini menyebabkan jangkauan informasi terbatas dan tidak terdokumentasi secara sistematis, sehingga masyarakat sering terlambat memperoleh informasi penting terkait program desa dan layanan publik.

Potensi desa di sektor perikanan, pertanian, UMKM, dan pariwisata belum dipromosikan secara optimal melalui media digital. Produk hasil laut dan pertanian hanya dipasarkan secara konvensional di pasar lokal, sementara potensi wisata desa belum terdokumentasi dan dikenal secara luas. Ketiadaan platform digital menjadi hambatan dalam memperluas akses pasar dan promosi potensi lokal.

Pelayanan administrasi desa masih dilakukan secara konvensional. Warga harus datang langsung ke kantor desa dan menunggu antrean cukup lama untuk memperoleh layanan, seperti surat keterangan dan administrasi kependudukan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efisiensi pelayanan publik.



Gambar 1. Kondisi Eksisting di Desa Hansisi

Hasil wawancara dengan perangkat desa menunjukkan bahwa keterbatasan literasi digital menjadi salah satu faktor utama rendahnya pemanfaatan teknologi informasi.

Sekretaris Desa menyatakan: *“Selama ini kami belum punya website desa. Informasi biasanya ditempel di papan pengumuman atau disampaikan saat rapat warga. Kalau warga tidak datang, mereka sering tidak tahu informasi terbaru.”*

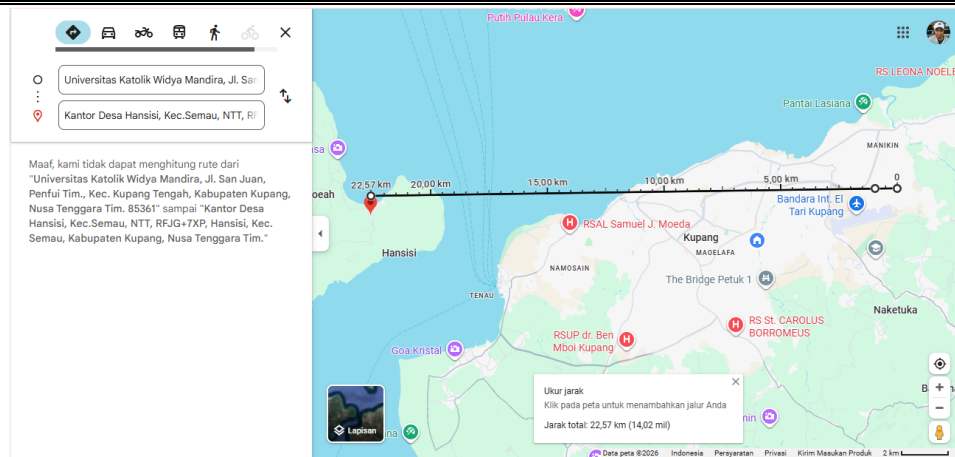
Kepala Desa juga menambahkan: *“Potensi desa sebenarnya besar, terutama hasil laut dan wisata. Tapi karena tidak ada media online, promosi masih sangat terbatas dan hanya diketahui masyarakat sekitar.”*

Terkait pelayanan administrasi, salah satu perangkat desa menyampaikan: *“Kalau warga mau urus surat, harus datang dan antre. Kadang kami kewalahan karena semua dikerjakan manual.”*

Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya akses masyarakat terhadap informasi publik, terbatasnya transparansi pemerintahan desa, serta minimnya partisipasi warga dalam pembangunan desa. Warga cenderung pasif karena kurang memperoleh informasi yang memadai terkait program dan kegiatan desa.

Berdasarkan kondisi mitra, permasalahan utama yang dihadapi Desa Hansisi meliputi:

- Tidak tersedianya media digital resmi sebagai pusat informasi desa.
- Rendahnya akses masyarakat terhadap informasi publik dan program desa.
- Pelayanan administrasi masih dilakukan secara manual dan kurang efisien.
- Potensi desa (perikanan, pertanian, UMKM, dan pariwisata) belum terdokumentasi dan dipromosikan secara digital.
- Keterbatasan literasi digital perangkat desa dalam pengelolaan media informasi berbasis teknologi.



Gambar 2. Peta Lokasi Kegiatan Pengabdian dengan Jarak \pm 22,57 Km dari Kampus

III. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Hansisi, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sasaran kegiatan adalah perangkat desa dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pelayanan publik desa. Jumlah responden yang terlibat secara langsung sebanyak 15 orang, terdiri atas 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 5 perangkat desa, dan 8 perwakilan masyarakat.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pendekatan partisipatif (*Participatory Action Research*) yang melibatkan mitra secara aktif pada seluruh tahapan kegiatan. Metode pelaksanaan terdiri atas tiga tahap utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

a. Tahap Persiapan

Meliputi observasi lapangan, wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, serta analisis kebutuhan sistem informasi desa. Pada tahap ini ditentukan fitur website yang dibutuhkan, seperti profil desa, berita desa, galeri kegiatan, layanan aspirasi masyarakat, dan promosi potensi lokal.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan meliputi:

- 1) Pengembangan website desa menggunakan CMS WordPress.
- 2) Instalasi domain dan hosting.
- 3) Pengisian konten awal (profil desa, struktur organisasi, potensi desa).
- 4) Pelatihan pengelolaan website kepada perangkat desa meliputi *login* admin, unggah berita, manajemen *menu*, dan *backup* data.
- 5) Pendampingan penggunaan website selama masa awal operasional.

c. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui:

- 1) *Pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan literasi digital perangkat desa.
- 2) Kuesioner kepuasan mitra.
- 3) Observasi pemanfaatan website oleh masyarakat.

Pengembangan sistem website desa dilakukan menggunakan model *waterfall* yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi yang dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Metode Pengembangan Website dengan Pendekatan *Waterfall*

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara bertahap dan sistematis untuk memastikan tercapainya tujuan program. Seluruh tahapan kegiatan disusun berdasarkan pendekatan partisipatif dan model pengembangan sistem *waterfall*, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi akhir (Agilemania, 2025; Telkom University, 2025). Setiap tahap dirancang untuk melibatkan mitra secara aktif serta menghasilkan luaran yang terukur. Rincian tahapan kegiatan, waktu pelaksanaan, aktivitas yang dilakukan, serta *output* yang dihasilkan disajikan secara lengkap pada Tabel 1.

Tabel 1. Proses Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

No	Tahap Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Uraian Aktivitas	Output yang Dihasilkan
1	Identifikasi Masalah dan Analisis Kebutuhan	Minggu ke-1 September 2025	Wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, observasi pelayanan administrasi, dan pemetaan kebutuhan sistem website	Daftar kebutuhan fitur website dan permasalahan pelayanan
2	Perancangan Sistem	Minggu ke-1 September 2025	Perancangan struktur menu, tampilan antarmuka (UI), dan pembagian hak akses pengguna	Desain struktur website dan skema hak akses
3	Implementasi Website	Minggu ke-2 September 2025	Instalasi CMS WordPress, konfigurasi tema dan plugin, serta pengisian konten awal desa	Website desa versi awal yang dapat diakses
4	Pengujian Sistem	Minggu ke-2 September 2025	Uji fungsionalitas menu, kompatibilitas perangkat, dan keamanan dasar sistem	Website stabil dan siap digunakan
5	Pelatihan Pengelola	Minggu ke-3 September 2025	Pelatihan pengelolaan konten website, unggah berita, manajemen pengguna	Perangkat desa mampu mengelola website secara mandiri
6	Pendampingan	Minggu ke-3 September 2025	Pendampingan langsung selama penggunaan awal website	Penguatan kapasitas pengelola
7	Evaluasi Kegiatan	Minggu ke-4 September 2025	Penyebaran kuesioner, wawancara singkat, dan observasi penggunaan website	Data kepuasan mitra dan rekomendasi pengembangan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Hansisi dilaksanakan secara bertahap dan sistematis, meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi website, pelatihan pengelola, serta evaluasi pemanfaatan sistem. Seluruh tahapan kegiatan dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan perangkat desa sebagai mitra utama, sehingga pengembangan sistem disesuaikan dengan kebutuhan riil pelayanan publik desa.



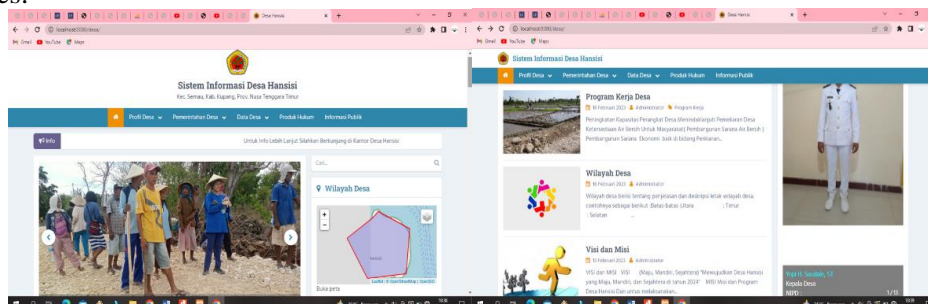
Gambar 4. Survei dan Wawancara terhadap Perangkat Desa Hansisi

Tahap awal kegiatan seperti yang telah diperlihatkan dalam Gambar 4, diawali dengan survei lapangan dan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta perangkat desa untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi dan permasalahan pelayanan publik. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan akses informasi yang cepat terkait pengumuman desa, bantuan sosial, kegiatan pemerintahan, serta prosedur pelayanan administrasi seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 5. Berdasarkan temuan tersebut, dirancang struktur website yang mencakup menu profil desa, berita desa, galeri kegiatan, informasi UMKM, potensi wisata, serta kanal aspirasi masyarakat. Struktur ini dirancang untuk menjadikan website sebagai pusat informasi terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat.



Gambar 5. Pengisian Data-Data atau Info tentang Desa Hansisi

Pada tahap implementasi, website desa dikembangkan menggunakan CMS WordPress dan dipublikasikan melalui domain resmi desa. Konten awal yang dimasukkan meliputi profil desa, struktur organisasi, berita kegiatan, serta dokumentasi potensi lokal desa. Setelah pengembangan selesai, dilakukan pengujian sistem untuk memastikan seluruh fitur berfungsi dengan baik dari sisi tampilan, navigasi, dan keamanan akses.



Gambar 6. Implementasi Hasil Website

Tahap berikutnya adalah pelatihan pengelola website yang diikuti oleh tujuh perangkat desa melalui metode demonstrasi dan praktik langsung, meliputi login administrator, pengunggahan artikel, pengelolaan

menu, dan pencadangan data. Pendampingan dilakukan selama satu minggu untuk memastikan perangkat desa mampu mengelola website secara mandiri.

Keberhasilan tahap pelatihan diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu:

1. Website aktif dan dapat diakses oleh perangkat desa
 Tolak ukurnya adalah website dapat diakses melalui jaringan lokal dan menampilkan informasi desa secara lengkap.
2. Peningkatan kompetensi perangkat desa
 Tolak ukurnya adalah minimal 80% peserta pelatihan mampu mengunggah artikel dan memperbarui konten secara mandiri.
3. Peningkatan akses informasi masyarakat
 Tolak ukurnya adalah masyarakat mulai memanfaatkan website sebagai sumber informasi desa.
4. Efektivitas pelayanan administrasi
 Tolak ukurnya adalah berkurangnya jumlah pertanyaan berulang terkait informasi layanan di kantor desa.

Tabel 2. Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Program Pengabdian

Aspek	Sebelum Program	Sesudah Program
Media informasi desa	Papan pengumuman dan pertemuan tatap muka	Website desa sebagai pusat informasi digital
Akses informasi masyarakat	Terbatas, tidak merata	Mudah diakses kapan saja melalui internet
Promosi potensi desa	Tidak terdokumentasi secara digital	Dipublikasikan melalui website
Pelayanan administrasi	Manual, antrean panjang	Lebih efisien, informasi tersedia daring
Literasi digital perangkat desa	Rendah	Meningkat setelah pelatihan
Dokumentasi kegiatan	Tidak terserip sistematis	Tersimpan dalam website

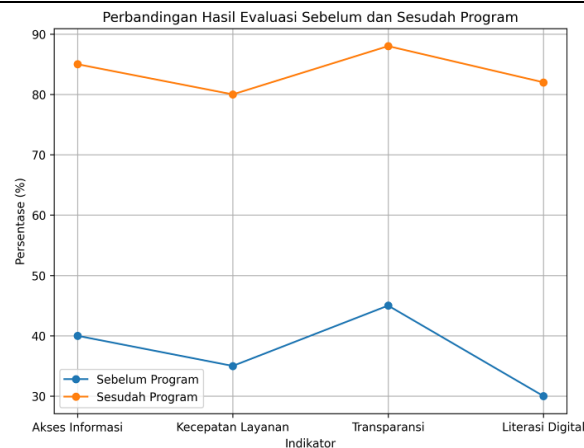
Tabel 2 menunjukkan adanya perubahan signifikan setelah program pengabdian dilaksanakan. Website desa berfungsi sebagai pusat informasi terpadu yang mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai informasi dan layanan publik. Selain itu, kemampuan perangkat desa dalam memanfaatkan teknologi informasi juga meningkat secara nyata.

Evaluasi keberhasilan kegiatan dilakukan menggunakan metode *pre-test* dan *post-test* serta observasi pemanfaatan website. *Pre-test* diberikan sebelum pelatihan untuk mengukur kondisi awal literasi digital perangkat desa dan pemahaman pengelolaan website. *Post-test* diberikan setelah pelatihan dan pendampingan untuk mengukur peningkatan kompetensi. Selain itu, kuesioner kepada masyarakat digunakan untuk mengukur perubahan akses informasi dan persepsi terhadap pelayanan publik desa. Indikator yang diukur meliputi akses informasi, kecepatan pelayanan, transparansi pemerintahan, dan literasi digital perangkat desa.

Hasil evaluasi kuantitatif yang disajikan pada Tabel 3 (*Pre-test* dan *Post-test*) menunjukkan adanya peningkatan pada seluruh indikator. Akses informasi masyarakat meningkat dari 40% pada tahap *pre-test* menjadi 85% pada tahap *post-test*. Kecepatan pelayanan administrasi meningkat dari 35% menjadi 80%, transparansi pemerintahan meningkat dari 45% menjadi 88%, dan literasi digital perangkat desa meningkat dari 30% menjadi 82%. Pola peningkatan tersebut divisualisasikan secara jelas pada Gambar 7 (Grafik Perbandingan Hasil Evaluasi Sebelum dan Sesudah Program) yang memperlihatkan lonjakan capaian pada seluruh indikator setelah implementasi website dan pelatihan pengelolaan sistem.

Tabel 3. Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test* Mitra

Indikator	<i>Pre-Test</i> (%)	<i>Post-Test</i> (%)
Akses Informasi	40	85
Kecepatan Pelayanan	35	80
Transparansi Pemerintahan	45	88
Literasi Digital Perangkat	30	82



Gambar 7. Perbandingan Hasil Evaluasi Sebelum dan Sesudah Program

Peningkatan nilai pada keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa implementasi website desa tidak hanya berdampak pada ketersediaan media informasi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kapasitas sumber daya manusia desa. Website berfungsi sebagai pusat informasi terpadu, media transparansi pemerintahan, serta sarana promosi potensi lokal desa. Dengan demikian, permasalahan utama mitra terkait keterbatasan akses informasi, pelayanan manual, dan belum optimalnya promosi potensi desa dapat diatasi melalui pendekatan digital berbasis website.

Meskipun hasil evaluasi menunjukkan capaian yang positif, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan, terutama keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah desa serta perbedaan tingkat literasi digital antarperangkat desa. Sebagian peserta memerlukan waktu lebih lama untuk memahami pengelolaan sistem. Keterbatasan fasilitas pendukung seperti jumlah komputer dan kualitas koneksi internet juga menjadi hambatan teknis selama pelatihan. Namun, kendala tersebut dapat diminimalkan melalui pendampingan intensif dan pemanfaatan perangkat pribadi peserta.

Secara keseluruhan, hasil *pre-test* dan *post-test* yang disajikan dalam tabel dan grafik menegaskan bahwa program implementasi website Desa Hansisi berhasil meningkatkan akses informasi, efisiensi pelayanan, transparansi pemerintahan, serta literasi digital perangkat desa. Website desa memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut melalui penambahan fitur layanan administrasi daring, integrasi dengan sistem kependudukan, serta pengembangan sebagai media promosi UMKM dan wisata desa. Pengembangan lanjutan ini diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan program serta memperluas dampak positif transformasi digital di tingkat desa.

V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil menjawab tujuan utama, yaitu merancang dan mengimplementasikan website Desa Hansisi sebagai media informasi dan pelayanan publik digital. Website yang dikembangkan terbukti mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi desa, memperbaiki transparansi pemerintahan, serta memperkuat kapasitas perangkat desa dalam pemanfaatan teknologi informasi. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital di tingkat desa dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Program implementasi website Desa Hansisi berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kapasitas digital perangkat desa. Keberhasilan program ditunjukkan oleh capaian seluruh indikator ketercapaian, yaitu peningkatan akses informasi masyarakat dari 40% menjadi 85%, efisiensi pelayanan administrasi dari 35% menjadi 80%, serta literasi digital perangkat desa dari 30% menjadi 82%. Capaian tersebut membuktikan bahwa website desa efektif sebagai pusat informasi publik, media transparansi pemerintahan, dan sarana promosi potensi lokal desa.

Untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) program, diperlukan komitmen perangkat desa dalam pengelolaan dan pembaruan konten secara rutin, serta dukungan infrastruktur jaringan internet yang memadai. Pengembangan lanjutan direkomendasikan melalui penambahan fitur layanan administrasi daring, integrasi data kependudukan, dan pelaksanaan pelatihan berkala bagi pengelola website. Model pengabdian ini dapat

direplikasi pada desa lain dengan karakteristik serupa, khususnya wilayah pesisir dan kepulauan, guna memperkuat tata kelola pemerintahan desa berbasis digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada: Pemerintah Desa Hansisi, Universitas Katolik Widya Mandira, dan Seluruh perangkat desa dan masyarakat yang telah mendukung kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, W., & Sutrisno, S. (2022). Pengembangan Website Desa sebagai Sistem Informasi dan Inovasi di Desa Indu Makkombong, Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 505–512. <https://doi.org/10.54082/jamsi.276>
- Admin. (2025, October 21). *Digitalisasi Desa: Menuju Pelayanan Cepat, Ekonomi Kuat, dan Masyarakat Cerdas / DigitalDesa.id*. Digital Desa. <https://digitaldesa.id/artikel/digitalisasi-desa-jalan-baru-menuju-pelayanan-cepat-ekonomi-kuat-dan-masyarakat-cerdas>
- Adnan, I. Z., Adnan, Z., Fadhlurrohman, M. I., & Fauzan, H. S. (2024). Implementation of e-Government through System Village Information (SID) (Case Study of Talaga Jaya Village, Garut Regency). *Sinergi International Journal of Communication Sciences*, 2(2), 106–121. <https://doi.org/10.61194/ijcs.v2i2.296>
- Agilemania. (2025, December 5). *What Is the Waterfall Model in Software Engineering? What Is the Waterfall Model in Software Engineering?* <https://agilemania.com/waterfall-model-in-software-engineering>
- Al-Ra'zie, Z. H., Syarkawi, Putri, S. A., & Silaen, M. V. (2025). Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat Desa Melalui Digitalisasi Di Desa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 196–207. <https://doi.org/10.32493/abdilaksana.v6i1.47065>
- Anto, Mappasere, F. A., Abdi, & Alyas. (2025). The Role of E-government in Improving Efficiency and Transparency in Public Services in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 92–106. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i16.19157>
- Ariyanto, M., Saputra, P. P. S., Rahim, A. R., Sukaris, S., & Fauziyah, N. (2021). Sistem Informasi Desa Berbasis Web di Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. *DedikasiMU: Journal of Community Service*, 3(1), 679–687. <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v3i1.2346>
- Artamevia, M., Lubis, M., & Mukti, I. (2026). Pemanfaatan Website Desa sebagai Media Transformasi Digital dalam Layanan Administratif dan Promosi Pariwisata Desa. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 7(1), 14–14. <https://doi.org/10.47134/villages.v7i1.366>
- Djabbari, M. H., B, I., Nugroho, T. C., Amiruddin, I., & Yanto, E. (2024). Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik Berbasis Website di Desa Tondowolio Kabupaten Kolaka. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 158–170. <https://doi.org/10.26618/kjap.v10i2.15588>
- Isabella, Agustian, E., Baharuddin, T., & Ibrahim, A. H. H. (2025). Bridging e-government with digital literacy: A literature review. *Journal of Governance and Regulation*, 14(1, special issue), 361.
- Lailiyah, K. (2022). Digitalisasi Desa Sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Good Governance. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang*, 6(2), 26–34. <https://doi.org/10.55686/ristek.v6i2.112>
- Liao, F., Zheng, Y., & Yang, D. (2025). Digital transformation in rural governance: Unraveling the micro-mechanisms and the role of government subsidies. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1423. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-05716-9>
- Maharani, H., & Ulfa, M. (2022). Sistem Informasi Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Web. *Jurnal Informasi dan Teknologi*, 136–141. <https://doi.org/10.37034/jidt.v4i3.212>
- Mao, Z., Zhu, X., Zou, Q., & Jin, W. (2024). How Can Digital Villages Improve Basic Public Services Delivery in Rural Areas? Evidence from 1840 Counties in China. *Agriculture*, 14(10), 1802. <https://doi.org/10.3390/agriculture14101802>
- Mappisabbi, F., Haris, A., & Zuhri, W. (2024). Implementasi E-Government dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik di Era Digital. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 174–184. <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i2.2036>
- Nani, P. A., Amaral, M. A. L., Boelan, E. G., Baunsele, A., Sinlae, A. A. J., & Ketmoen, A. (2023). Pelatihan Digital Marketing Dalam Memasarkan Produk Badan Usaha Milik Desa. *Bakti Cendana*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.32938/bc.6.1.2023.77-84>
- Nani, P. A., Sinlae, A. A. J., Batarius, P., Mamulak, N. M. R., Aliandu, P., Ngaga, E., & ... (2020). Platform Digital Kelurahan Babau. In *Jurnal PATRIA* (Vol. 2, Issue 2, pp. 97–103).
- Nurfadillah, A., Nursamsir, & Mardiana. (2025). Penerapan E-Government pada Sektor Pelayanan Publik (Studi Kasus Aplikasi OpenSID di Desa Tondowolio Kecamatan Tangetada Kabupaten Kolaka). *PENA BANGSA: Bisnis Dan Tata Kelola Publik Adaptif*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.69616/pb.v1i1.256>

-
- Panjaitan, F. S., Batubara, J., & Sinta, R. (2025). Study on the Implementation of E-Government at the Village Level and Its Impact on Public Services. *Inspirasi & Strategi (INSPIRAT): Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis*, 16(1), 5–14.
- Sangaji, M. S. J., & Irianto, J. (2025). Transformasi Inovasi Pelayanan Publik menuju Pemerintahan Digital. *Jejaring Administrasi Publik*, 17(1), 54–70. <https://doi.org/10.20473/jap.v17i1.72708>
- Sinlae, A. A. J., Nani, P. A., Amaral, M. A. L., Ketmoen, A., Tukan, G. D., & Ratumakin, P. A. K. L. (2023). Pelatihan Digital Marketing Untuk Penguatan Kapasitas Bumdes Kecamatan Kupang Barat. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.46306/jabb.v4i1.363>
- Telkom University. (2025, September 10). Metode Waterfall dalam Pengembangan Sistem: Definisi, Tahapan, dan Contohnya. *Program Studi S2 Informatika*. <https://mif.telkomuniversity.ac.id/metode-waterfall-dalam-pengembangan-sistem-definisi-tahapan-dan-contohnya/>
- Vereinte Nationen (Ed.). (2020). *Digital government in the decade of action for sustainable development*. United Nations.
- Wanda, R. C. (2025). Penerapan Website Desa Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Jabung Kabupaten Magetan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 2(2), 96–106. <https://doi.org/10.70214/mrp59m16>